



Diskontinuitas Kurikulum Pendidikan Indonesia

Sopian Tamrin¹, Syamsu A Kamaruddin², Arlin Adam³

¹ Sosiologi, Universitas Negeri Makassar

E-mail: sopiantamrin@unm.ac.id

² Sosiologi, Universitas Negeri Makassar

E-mail: syamsukamaruddin@gmail.com

³ Promkes, FKM UPRI Makasar

E-mail: arlin.adam73@gmail.com

Abstract. *Education in Indonesia has never really been formulated in depth and long-term. This is evidenced by the curriculum changes over time. The curriculum in Indonesia has changed at least eleven times. These changes most often occur at the transition of power in the government. This research aims to examine the historical faults of the education curriculum in Indonesia through the perspective of Michel Foucault's discontinuity theory. This research is a type of literature study and descriptive qualitative approach with historical analysis. Data were collected through relevant literature sources, such as journal articles, books, research reports, and education policies that have been implemented in Indonesia. The results showed that curriculum changes in Indonesia showed a change in the dominant discourse of each power regime. Therefore, curriculum development in Indonesia is not linear and continuous but rather a set of historical faults over time. This study concludes that a more sustainable and long-term oriented approach is needed in curriculum formulation in Indonesia in order to create a stable and long-term oriented education system.*

Keywords : *Curriculum; Education; Discontinuities*

Abstrak. *Pendidikan di Indonesia tidak pernah benar-benar dirumuskan secara mendalam dan berorientasi jangka panjang. Hal ini terbukti dengan perubahan kurikulum dari waktu-waktu. Kurikulum di Indonesia setidaknya mengalami perubahan sebelas kali. Perubahan tersebut paling sering terjadi pada transisi pergantian kekuasaan dalam pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji patahan historis kurikulum pendidikan di Indonesia melalui perspektif teori diskontinuitas Michel Foucault. Penelitian ini merupakan jenis studi literatur dan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis historis. Data dikumpulkan melalui sumber literatur yang relevan, seperti artikel jurnal, buku, laporan penelitian, serta kebijakan pendidikan yang pernah diterapkan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kurikulum di Indonesia menunjukkan adanya perubahan diskursus dominan setiap rezim kekuasaan. Oleh karena itu, perkembangan kurikulum di Indonesia tidaklah bersifat linear dan berkelanjutan melainkan sekumpulan patahan historis dari waktu ke waktu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan yang lebih berkesinambungan dan berorientasi jangka panjang sangat diperlukan dalam perumusan kurikulum di Indonesia agar mampu menciptakan sistem pendidikan yang stabil dan berorientasi jangka panjang.*

Kata Kunci : *Kurikulum; Pendidikan; Diskontinuitas*

PENDAHULUAN

Kurikulum sebagai bagian inti dari pendidikan memiliki peran penting dalam menentukan arah pembelajaran, standar pengetahuan, dan keterampilan yang diajarkan di sekolah. Meskipun demikian, kurikulum di Indonesia cenderung tidak memiliki konsistensi dan kestabilan dalam jangka panjang. Sepanjang sejarahnya, sistem kurikulum di Indonesia sering mengalami perubahan, terutama seiring dengan pergantian kekuasaan dalam pemerintahan (Alhamuddin, 2014)

Perubahan ini, meskipun dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sering kali lebih mencerminkan kepentingan politik daripada kebutuhan mendesak dunia pendidikan. Pergantian kurikulum ini sering kali tidak didasarkan pada evaluasi mendalam terhadap kurikulum sebelumnya, melainkan sebagai respons cepat terhadap perubahan politik dan kepentingan jangka pendek.

Perubahan kurikulum ini menunjukkan bahwa proses perumusan dan pengembangan kurikulum tidak benar-benar berorientasi pada kepentingan jangka panjang atau kebutuhan pendidikan nasional secara menyeluruh. Sebaliknya, kurikulum kerap kali dirombak atau disesuaikan dengan visi dan prioritas rezim pemerintahan yang sedang berkuasa. Namun, di Indonesia, perubahan kurikulum kerap kali menjadi isu yang kompleks dan kontroversial. Sepanjang sejarahnya, sistem kurikulum di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan yang tidak jarang terjadi secara tiba-tiba dan terputus dari evaluasi mendalam atas implementasi kurikulum sebelumnya.

Kurikulum pendidikan di Indonesia telah mengalami perubahan paling tidak sebanyak 11 kali. Menurut Ananda & Hudaidah, (2021) dalam penelitiannya membagi perubahan kurikulum dalam tiga babakan sejarah. Pertama pada Masa Orde Lama (1945-1965) yang terdiri dari 3 kurikulum atau tidak kali perubahan yaitu Kurikulum 1947, Kurikulum 1952 dan Kurikulum 1964. Kedua terjadi pada masa Orde Baru (1966-1998) yakni ada 4 kurikulum yakni Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984 dan Kurikulum 1994. Ketiga adalah penanda masa reformasi di mana terdiri dari 3 kurikulum yakni Kurikulum 2004, Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013. Perubahan ini belum termasuk dengan kurikulum merdeka yang masih berlaku hingga saat ini.

Masa berlaku kurikulum merdeka-pun sepertinya tidak lama lagi. Menteri pendidikan yang baru telah mewacanakan istilah *Deep Learning* sebagai paradigma baru dalam pendidikan ke depan. Artinya trend perubahan kurikulum masih terus berlanjut. Menurut Wahyuni, (2015) Perubahan kurikulum merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa stabilitas kurikulum adalah hal yang sulit karena masyarakat senantiasa terus berubah dan dinamis terhadap perkembangan.

Stabilitas dan kontinuitas dalam sistem pendidikan adalah elemen krusial untuk mencapai kualitas pendidikan yang mapan (Haryono et al., 2024). Tanpa keberlanjutan, perkembangan pendidikan akan terfragmentasi dan berpotensi menghambat peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Pendidikan yang terus mengalami perubahan dalam hal kurikulum sulit untuk mengadopsi visi jangka panjang, yang berimbas pada ketidakefisienan dalam pencapaian hasil pembelajaran.

Ketiadaan konsistensi ini berdampak pada kesiapan tenaga pendidik dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Guru, sebagai garda terdepan implementasi kurikulum, mengalami kesulitan mengikuti perubahan yang terjadi dalam waktu singkat. Perubahan kurikulum tentu berimplikasi pada beban tambahan bagi para guru dan pengelola sekolah. Sedangkan perubahan membutuhkan pelatihan baru, pembaruan bahan ajar, dan adaptasi metode pengajaran. Hal ini tentu menguras waktu, tenaga, dan biaya yang besar. Dengan adanya kebijakan kurikulum yang stabil, para guru dapat fokus pada peningkatan kualitas pengajaran tanpa harus terus-menerus beradaptasi dengan perubahan kebijakan. Masalah ini diperburuk oleh beban administrasi yang semakin berat, yang mengurangi waktu guru untuk fokus pada pembelajaran siswa. Akibatnya, kurikulum yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan justru menimbulkan justru menimbulkan distabilitas pada pelaksanaan Pendidikan.

Perubahan kurikulum di Indonesia merupakan fakta dari kurangnya perencanaan strategis yang matang dan minimnya pelibatan para pemangku kepentingan utama, seperti guru, siswa, orang tua, dan komunitas pendidikan. Tanpa perencanaan yang komprehensif, kurikulum baru kerap diterapkan secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, pelatihan guru, dan kesesuaian dengan kebutuhan lokal. Selain itu, kurangnya konsultasi dengan pihak-pihak yang langsung terlibat dalam proses pendidikan menghasilkan kebijakan yang tidak relevan atau sulit diimplementasikan di lapangan. Akibatnya, perubahan kurikulum sering kali hanya menjadi agenda politis yang kurang berdampak signifikan pada kualitas pendidikan, menciptakan siklus permasalahan yang terus berulang tanpa solusi yang berkelanjutan.

Berdasarkan penelusuran tema penelitian terkait perubahan kurikulum dalam tiga tahun terakhir, maka ditemukan beberapa fokus sebagai berikut; (Santika et al., (2022) menganalisis perubahan kurikulum dari makna kurikulum sebagai ide yang hidup di tengah masyarakat. Kemudian (Erin Aprillia et al., (2022) dalam penelitiannya menegaskan bahwa perubahan kurikulum adalah sebuah keharusan untuk mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan Adventyana et al., (2024) meneliti terkait perubahan kurikulum yang memberikan dampak bagi guru maupun peserta didik. Dengan demikian, penelitian ini mengambil focus berbeda dengan memotret fenomena diskontinuitas wacana kekuasaan dan kepentingan rezim pemerintahan dalam perubahan kurikulum pendidikan dari waktu ke waktu. Fenomena ini menunjukkan bahwa perubahan kurikulum sering kali didorong oleh dinamika politik dan wacana kekuasaan daripada kebutuhan nyata masyarakat pendidikan.

Hal ini sejalan dengan pemikiran Michel Foucault yang menyatakan bahwa kebijakan, termasuk dalam pendidikan, sering kali mencerminkan rezim kebenaran yang dibangun oleh kekuasaan tertentu untuk mempertahankan dominasi dan legitimasi. Fenomena ini mengindikasikan bahwa kurikulum bukan sekadar dokumen pendidikan, melainkan bagian dari arena kekuasaan di mana wacana tertentu dikuatkan dan dipertahankan. Dengan demikian, memahami kurikulum tidak dapat dilepaskan dari analisis kritis terhadap hubungan antara kebijakan pendidikan, kekuasaan, dan wacana yang menguasai ruang sosial dan politik. Melalui kerangka pemikiran kritis Michel Foucault tulisan ini diharapkan menawarkan cara pandang berbeda dalam menjelaskan perubahan kurikulum. Alih-alih memberikan dukungan pada wacana dominan atas argumentasi pemerintah, penulis justru berupaya menunjukkan kerja rezim yang berupaya melegitimasi dominasi kuasa atas wacana melalui perubahan kurikulum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode studi pustaka (*literature review*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Studi pustaka ini berfokus pada analisis perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia dari waktu ke waktu, menggunakan teori diskontinuitas (Foucault & Nazzaro, (1972) sebagai landasan analisis. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pola diskontinuitas yang tampak dalam sejarah perubahan kurikulum di Indonesia serta pengaruh kekuasaan politik dalam pembentukan kebijakan pendidikan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui berbagai sumber literatur yang relevan, seperti artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dokumen kebijakan pendidikan, serta data terkait lainnya. Sumber-sumber ini dipilih secara purposif, yakni berdasarkan relevansi dengan fokus kajian mengenai perkembangan kurikulum dan wacana kekuasaan yang menyertainya. Selain itu, sumber-sumber tersebut dipilih untuk mencakup berbagai periode historis, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai pola perubahan kurikulum di Indonesia dan kaitannya dengan kondisi politik pada setiap era.

Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis), di mana

data literatur yang diperoleh dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola diskontinuitas dan hubungan antara perubahan kurikulum dengan pergantian rezim politik di Indonesia. Setiap kebijakan kurikulum yang diidentifikasi diperlakukan sebagai bentuk wacana yang mencerminkan pengaruh kekuasaan. Dalam proses ini, penelitian menelusuri elemen-elemen penting dalam setiap kebijakan kurikulum, seperti tujuan pendidikan, metode pengajaran, nilai-nilai yang ditekankan, serta wacana dominan yang melatarbelakangi perubahan kebijakan tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kurikulum ibarat menu, ia menentukan rasa pembangunan manusia setiap bangsa. Di Indonesia sendiri, kurikulum telah berubah puluhan kali sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Setiap perubahan kurikulum membawa cita rasa baru dalam pendidikan, baik dalam hal tujuan, metode, maupun nilai-nilai yang ingin ditanamkan kepada peserta didik. Sebelum mengulas bagaimana perubahan kurikulum dalam konteks diskontinuitas ala Michel Foucault, maka terlebih dahulu perlu dilihat fase-fase perubahan tersebut.

1. Kurikulum 1947

Kurikulum ini disebut juga sebagai Rencana Pembelajaran 1947, ini merupakan kurikulum pertama setelah kemerdekaan Indonesia (Insani et al., 2019). Kurikulum ini lebih berfokus pada pendidikan karakter dan nasionalisme, sesuai dengan semangat baru sebagai negara merdeka. Struktur kurikulum ini masih sangat sederhana, dengan fokus pada pendidikan moral dan pembentukan identitas nasional untuk memperkuat semangat kebangsaan di kalangan generasi muda

2. Kurikulum 1952

Kurikulum ini mengalami perubahan signifikan dalam hal metode pembelajaran. Pendekatan yang digunakan adalah metode subject-centered, dengan penekanan pada pengembangan ilmu pengetahuan di samping pendidikan karakter. Struktur kurikulum ini lebih kompleks dibandingkan kurikulum 1947, dan mulai memperkenalkan beberapa mata pelajaran baru yang lebih terstruktur. Kurikulum ini juga mencoba menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan masyarakat pada saat itu (Abidin et al., 2023).

3. Kurikulum 1964

Di masa pemerintahan Presiden Sukarno, kurikulum berubah lagi menjadi lebih fokus pada pembentukan pancawardhana (lima aspek pengembangan): perkembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Kurikulum ini merupakan respons terhadap situasi politik yang tidak stabil, dengan tujuan utama mencetak generasi penerus yang kuat dan siap membangun bangsa. Materi pelajaran pada kurikulum ini dirancang untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, sesuai dengan aspirasi politik Orde Lama yang berorientasi pada identitas nasional (Izmi, A., 2017).

4. Kurikulum 1968

Setelah bergantinya rezim ke era Orde Baru, kurikulum dirombak kembali. Kurikulum 1968 berfokus pada pembentukan manusia yang setia pada Pancasila dan Orde Baru. Pendidikan pada masa ini bertujuan untuk menciptakan generasi yang taat, patuh, dan mengabdikan pada negara sesuai ideologi pemerintahan saat itu. Kurikulum ini mencerminkan kebutuhan pemerintah untuk menanamkan stabilitas dan ketertiban sosial melalui pendidikan (Izmi, A., 2017).

5. Kurikulum 1975

Kurikulum 1975 merupakan pengembangan dari kurikulum 1968 yang disusun lebih sistematis dan terstruktur. Fokus utama kurikulum ini adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran, yang ditandai dengan penerapan metode instruksional seperti metode Instructional System Development (ISD). Pendekatan ini dirancang untuk menciptakan proses pembelajaran yang terukur dengan target pencapaian yang jelas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran, sesuai dengan perkembangan teknologi dan metodologi pendidikan modern saat itu (Budiono et al., 2021).

6. Kurikulum 1984

Kurikulum ini sering disebut sebagai kurikulum Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). Fokus utama dari kurikulum ini adalah pada peningkatan keaktifan siswa dalam proses belajar, dengan tujuan membangun keterampilan berpikir kritis. Pendekatan CBSA berupaya untuk membuat siswa lebih terlibat dalam pembelajaran, bukan hanya menjadi penerima informasi secara pasif. Kurikulum ini juga lebih menekankan pada metode belajar yang melibatkan siswa secara langsung dalam kegiatan pembelajaran (Soekmono, D., 1984).

7. Kurikulum 1994

Kurikulum 1994 merupakan kombinasi dari pendekatan kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Kurikulum ini memberikan porsi yang seimbang antara materi yang disampaikan guru dan keaktifan siswa. Namun, struktur kurikulum ini dianggap terlalu padat dan mengakibatkan beban belajar yang berat bagi siswa, karena banyaknya mata pelajaran yang harus dipelajari dalam satu waktu. Kurikulum ini juga menjadi awal dari pembagian waktu belajar yang lebih terstruktur, dengan mengatur mata pelajaran wajib dan pilihan

Kurikulum 1994 merupakan kurikulum yang dirancang untuk memperbaiki serta memperbaharui kurikulum 1984. Pada kurikulum ini, waktu dalam proses belajar mengajar pada tiap tahapnya adalah memakai sistem caturwulan, sehingga dalam satu tahun, ada tiga tahapan belajar yaitu caturwulan I, caturwulan II, dan caturwulan III. Hal ini tentunya membuat proses belajar mengajar menjadi padat. Sangat diharapkan dalam kurikulum ini siswa memiliki kemampuan, potensi, serta prestasi yang tinggi (Imron, M., 2018).

8. Kurikulum 2004

Dikenal sebagai Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), kurikulum ini berfokus pada pengembangan kompetensi siswa. Kurikulum ini dirancang untuk membekali siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan dunia kerja serta kebutuhan masyarakat. Dalam KBK, tujuan utama pembelajaran adalah pengembangan kompetensi dasar siswa, bukan sekadar pencapaian target akademik. Kurikulum ini mulai memperkenalkan konsep-konsep evaluasi berbasis kinerja dan asesmen berkelanjutan.

Keunggulan dari KBK adalah mengembangkan kompetensi-kompetensi peserta didik pada setiap aspek mata pelajaran. Kurikulum ini tidak menuntut penguasaan muatan mata pelajaran itu sendiri, bersifat alamiah (kontekstual), boleh jadi mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan lain, mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik /siswa (student oriented), guru diberikan kewenangan untuk menyusun silabus, bentuk laporan hasil belajar memudahkan evaluasi dan perbaikan siswa, memungkinkan peserta didik untuk mengeksplorasi kemampuannya secara optimal, dan ada bidang-bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang dalam pengembangannya

lebih tepat menggunakan pendekatan kompetensi (Muqorrobin, M., & Nisak, M., 2018)

9. Kurikulum 2006

Kurikulum ini sering disebut sebagai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum ini memberi otonomi kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Menurut Made Intan Dharma Santy & Nasution, (2024) KTSP memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk menyesuaikan materi pembelajaran berdasarkan karakteristik siswa dan kondisi lingkungan. Kurikulum ini diharapkan dapat meningkatkan kreativitas sekolah dan guru dalam merancang program pembelajaran yang lebih relevan dan kontekstual.

10. Kurikulum 2013 (K-13)

Kurikulum 2013 mengedepankan pendidikan karakter dan pengembangan kompetensi abad ke-21, seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Kurikulum ini berupaya mengintegrasikan berbagai aspek pengembangan karakter dan pembentukan keterampilan (Saputra, Aditya T., 2023). Fokus utama K-13 adalah pendekatan scientific approach, yang menekankan pada pembelajaran berbasis penemuan melalui kegiatan observasi, bertanya, bereksperimen, menalar, dan mengomunikasikan. K-13 juga memperkenalkan konsep asesmen autentik yang bertujuan untuk menilai siswa secara lebih komprehensif.

11. Kurikulum Merdeka (2022)

Kurikulum terbaru ini muncul sebagai tanggapan atas perubahan kebutuhan pendidikan di era globalisasi dan teknologi, serta sebagai respons terhadap dampak pandemi COVID-19. Menurut Hanipah et al., (2023) Kurikulum Merdeka menekankan pada fleksibilitas dan kemandirian sekolah dalam menentukan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kurikulum ini memperkenalkan pendekatan berbasis proyek untuk mengembangkan kompetensi sesuai dengan tantangan abad ke-21, dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk memilih mata pelajaran sesuai minat dan bakat mereka (Rahim & Ismaya, 2023). Kurikulum ini juga menitikberatkan pada pendidikan karakter serta keterampilan literasi dan numerasi yang esensial bagi generasi masa depan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian di atas maka dipandang perlu menggunakan perspektif teoritik dari Michel Foucault, terutama konsep diskontinuitas. Foucault (Jansen, 2008) mengkritik pendekatan sejarah tradisional yang mencoba mencari narasi besar (*grand narrative*) untuk menjelaskan perkembangan pengetahuan secara linier. Foucault berpendapat bahwa sejarah pengetahuan lebih tepat dipahami sebagai serangkaian pergeseran wacana yang terputus-putus. Sebagaimana yang dijelaskan Portschy, J. (2020) bahwa Setiap periode sejarah memiliki arsip pengetahuannya sendiri, yaitu himpunan aturan, praktik, dan sistem pemikiran yang membatasi apa yang dapat dikatakan dan diketahui pada waktu tertentu. Pergeseran dari satu arsip ke arsip berikutnya sering kali tidak mengikuti pola evolusi, tetapi terjadi sebagai hasil dari intervensi kekuasaan atau perpecahan mendadak dalam sistem wacana.

Foucault dalam Bevir, M., (1999) menjelaskan bahwa kekuasaan dan wacana dominan mempengaruhi arah kebijakan dan praktik sosial, termasuk dalam bidang pendidikan. Perubahan dalam masyarakat, termasuk pendidikan, tidak selalu berjalan secara linier atau berkesinambungan, melainkan melalui serangkaian patahan atau diskontinuitas setiap kali ada pergeseran kekuasaan atau wacana.

Kurikulum di Indonesia bukan sekadar kebijakan pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas belajar, tetapi lebih sering mencerminkan nilai-nilai dan tujuan politik penguasa pada periode tertentu. Hal tersebut berarti kurikulum dapat berperan sebagai instrumen kekuasaan yang digunakan

untuk mengontrol dan mendisiplinkan masyarakat agar selaras dengan nilai-nilai yang diinginkan oleh rezim yang berkuasa pada saat itu. Sebagaimana yang terjadi pada masa Orde Baru, menurut Wardhana (2023) kurikulum dirancang untuk menanamkan nilai-nilai kepatuhan dan stabilitas sosial, sesuai dengan visi politik pemerintah saat itu.

Pergantian ini menunjukkan bahwa kurikulum tidak hanya sebagai instrumen pendidikan, tetapi juga sarana untuk menyebarkan wacana yang relevan dengan kekuasaan pada setiap periode. Setiap perubahan kurikulum menurut Wulandari, T. R (2022) juga mengakibatkan perubahan besar dalam pendekatan, materi, dan tujuan pembelajaran, yang pada akhirnya menciptakan kesenjangan dalam kesinambungan proses pendidikan itu sendiri.

Diskontinuitas dalam wacana sangat jelas terlihat melalui pergantian kebijakan pendidikan yang mencerminkan pergeseran paradigma yang tidak memiliki kesinambungan dengan kebijakan sebelumnya. Hal tersebut disebut Foucault sebagai konsep Ruptur. Konsep ini mencerminkan momen ketika wacana lama dianggap tidak lagi relevan atau sah, sehingga perlu digantikan oleh wacana baru yang didorong oleh kebutuhan legitimasi politik, tekanan globalisasi, atau perubahan struktur sosial (Delissen, 2016).

Sebagai contoh, peralihan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ke Kurikulum 2013 tidak hanya menandai perubahan dalam pendekatan pembelajaran, tetapi juga menunjukkan pergeseran paradigma yang signifikan. KTSP memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk mengembangkan pembelajaran sementara Kurikulum 2013 membawa wacana baru yang menekankan pendekatan saintifik, penguatan pendidikan karakter, dan daya saing global. Namun, transisi ini tidak disertai dengan kesiapan yang memadai, baik dari segi pelatihan guru, penyediaan buku teks, maupun infrastruktur pendukung, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam implementasi.

Ruptur ini menunjukkan bagaimana kekuasaan memanfaatkan perubahan untuk membangun legitimasi baru, sering kali tanpa kesinambungan dengan pengalaman sebelumnya (Iyer, 2014). Kurikulum baru tidak hanya membawa visi baru, tetapi juga menghapus atau melemahkan legitimasi wacana yang sebelumnya berlaku. Hal ini mencerminkan bahwa perubahan kurikulum tidak sekadar merupakan proses teknis, tetapi juga arena konflik politik dan sosial, di mana kekuasaan berupaya mengontrol arah pendidikan dan membentuk generasi baru sesuai dengan kebutuhan wacana yang diinginkan.

Foucault (Goswami, 2014) memandang bahwa wacana sebagai cara masyarakat berbicara dan berpikir tentang sesuatu—terbentuk oleh kekuasaan dan rezim kebenaran pada suatu periode tertentu. Diskontinuitas muncul ketika wacana yang berlaku pada suatu waktu tiba-tiba digantikan oleh wacana baru yang sepenuhnya berbeda. Perubahan kurikulum seperti dari Kurikulum 1975 ke Kurikulum 1984, kemudian ke Kurikulum 1994, hingga Kurikulum 2013, menunjukkan bahwa setiap kurikulum baru membawa wacana yang berbeda, seolah-olah meniadakan pengalaman dan hasil evaluasi dari kurikulum sebelumnya. Setiap perubahan sering kali diikuti oleh narasi bahwa kurikulum lama tidak lagi relevan, tanpa penjelasan mendalam mengenai kesalahan spesifik yang harus diperbaiki atau bagaimana kurikulum baru dapat menjawab masalah yang ada.

Misalnya, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang diperkenalkan pada tahun 2004 menekankan pengembangan kompetensi siswa, tetapi tidak sepenuhnya diadopsi dan segera digantikan oleh Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun 2006, yang memberikan fleksibilitas kepada sekolah. Namun, dalam waktu yang relatif singkat, KTSP digantikan oleh Kurikulum 2013 yang membawa wacana baru tentang pendekatan saintifik dan penguatan pendidikan karakter. Transisi ini sering kali dilakukan tanpa evaluasi menyeluruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kurikulum

sebelumnya, menciptakan kesenjangan dalam proses pembelajaran.

Diskontinuitas ini mencerminkan bagaimana wacana pendidikan di Indonesia dibentuk oleh kepentingan politik, ekonomi, atau globalisasi yang mendominasi pada periode tertentu. Misalnya, pada penerapan Kurikulum 2013 didominasi oleh wacana peningkatan daya saing global, tetapi implementasinya menghadapi tantangan besar, karena ketidaksiapan guru dan infrastruktur yang belum memadai. Perubahan ini dapat dipahami sebagai hasil dari dinamika kekuasaan yang menciptakan wacana baru dalam pendidikan untuk memenuhi kepentingan tertentu.

Sebagaimana menurut (Mubarok et al., 2021) bahwa Kurikulum baik pada tahap kurikulum sebagai ide, rencana, pengalaman maupun kurikulum sebagai hasil dalam pengembangannya harus mengacu atau menggunakan landasan yang kuat dan kokoh, agar kurikulum tersebut dapat berfungsi serta berperan sesuai dengan tuntutan pendidikan yang ingin dihasilkan seperti tercantum dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. Paling tidak perubahan kurikulum memenuhi empat pendasaran yakni aspek filosofis, sosiologi, psikologis, yuridis (Kaimuddin, 2015). Sedangkan pada tataran sekolah ada enam yang perlu diperhatikan, yakni analisis profil siswa, penyederhanaan materi, pembuatan modul, pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, pelatihan aplikasi serta evaluasi dan perbaikan terus menerus (Doringin, 2022).

Perubahan kurikulum tidak sekadar aspek episteme yang abstrak melainkan sebagai praktik diskursif (Gough, 2019). Praktik diskursif mencerminkan proses pengendalian wacana melalui tindakan konkret di lapangan. Faktanya praktik diskursif tidak hanya menjadi alat untuk memperkenalkan gagasan baru, tetapi juga cara untuk memastikan gagasan tersebut tertanam dalam sistem pendidikan dan diadopsi oleh para pelaku di tingkat operasional, seperti guru, kepala sekolah, dan institusi pendidikan. Misalnya pada saat implementasi Kurikulum 2013, salah satu bentuk praktik diskursif yang menonjol adalah pelatihan masif untuk guru mengenai pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa konsep-konsep dalam kurikulum baru dipahami dan diterapkan dengan benar di kelas. Selain itu, pemerintah menerbitkan buku teks baru yang didesain untuk mendukung kerangka pikir dan strategi pengajaran yang sesuai dengan wacana kurikulum tersebut. Proses ini juga mencakup regulasi yang mewajibkan sekolah-sekolah untuk mengadopsi kurikulum baru, meskipun sering kali dihadapkan pada tantangan seperti minimnya kesiapan infrastruktur atau resistensi dari para pelaku pendidikan.

Perubahan praktik diskursif ini menunjukkan bagaimana wacana baru diperkenalkan dan diperkuat melalui kebijakan pendidikan. Ketika praktik-praktik ini berubah secara signifikan, diskontinuitas menjadi tampak jelas, di mana paradigma lama yang sebelumnya mendominasi digantikan oleh paradigma baru yang menciptakan norma dan standar baru dalam pendidikan. Hal ini memperlihatkan bagaimana perubahan kurikulum tidak sekadar proses teknis, tetapi juga proses politik dan sosial yang bertujuan mengukuhkan wacana tertentu dalam sistem pendidikan.

Menurut Foucault dalam McHoul (2015) bahwa kekuasaan bekerja melalui wacana untuk membentuk cara berpikir dan perilaku individu dalam masyarakat. Artinya perubahan kurikulum mencerminkan pergantian wacana dominan yang terjadi pada tiap rezim politik. Kurikulum 1947, misalnya, lahir dalam konteks baru kemerdekaan Indonesia dan lebih berfokus pada pendidikan karakter dan semangat nasionalisme (Insani et al., 1947). Kemudian, di bawah kepemimpinan Orde Baru, Kurikulum 1968 dirancang untuk membentuk generasi yang setia pada ideologi negara dan pemerintah, yang mencerminkan kontrol kekuasaan terhadap Pendidikan (Asri, M., 2017)

Selain sebagai instrumen kekuasaan, kurikulum di Indonesia juga digunakan sebagai alat untuk membentuk identitas sosial dan menormalisasi perilaku masyarakat sesuai dengan kehendak penguasa.

Menurut Foucault (Miller, 1990) kekuasaan memiliki kemampuan untuk membentuk realitas sosial melalui proses normalisasi, di mana masyarakat diajarkan untuk menerima norma-norma tertentu sebagai hal yang wajar dan benar. Termasuk pada masa Orde Baru di mana kekuasaan mengoperasikan diskursus episteme kurikulum untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dan loyalitas pada pemerintah, sehingga menciptakan keseragaman pemikiran yang mendukung stabilitas politik.

Melalui perubahan kurikulum pemerintah dapat mengatur isi dan cara pembelajaran di sekolah, yang pada akhirnya berdampak pada cara berpikir dan bertindak masyarakat (Julaeha, S., 2019). Kurikulum 1975 dan 1984, yang masing-masing diperkenalkan untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran dan keaktifan siswa, juga mencerminkan upaya penguasa untuk mendisiplinkan masyarakat dalam bentuk yang lebih halus melalui pengembangan keterampilan berpikir kritis dan aktif dalam proses belajar (Hasibuan et al., 2023).

Disiplin tubuh bagi Foucault (1975) merujuk pada cara institusi, termasuk sekolah, menciptakan individu yang patuh melalui kontrol ketat atas aktivitas fisik dan mental. Dalam lingkungan pendidikan, kurikulum bertindak sebagai alat untuk mengatur perilaku siswa—mulai dari bagaimana mereka belajar, berbicara, bergerak, hingga berinteraksi satu sama lain. Proses ini melibatkan aturan eksplisit dan implisit yang didesain untuk menciptakan keteraturan dan efisiensi dalam sistem pendidikan.

Menurut Foucault pendisiplinan tubuh ini tidak hanya bersifat represif tetapi juga produktif (Pylypa, J., 1998). Artinya, meskipun membatasi kebebasan individu, kurikulum juga menghasilkan individu yang sesuai dengan kebutuhan sosial dan ekonomi tertentu. Dengan menanamkan norma-norma tertentu melalui kurikulum, sistem pendidikan menciptakan subjek yang teratur, yaitu individu yang internalisasi nilai-nilai sosial dominan. Misalnya, alokasi waktu dalam jadwal pelajaran, struktur kelas, dan metode evaluasi adalah wujud konkret dari pendisiplinan tubuh dalam pendidikan. Para siswa diajarkan untuk menghargai waktu, mentaati aturan, dan mematuhi hierarki otoritas—nilai-nilai yang diperlukan untuk keberhasilan dalam masyarakat modern. Dengan memahami hubungan antara kurikulum dan disiplin tubuh, kita dapat melihat bagaimana pendidikan berfungsi sebagai arena pertarungan kekuasaan yang membentuk individu dan masyarakat secara lebih luas.

Kurikulum memang tidak bisa dipungkiri sebagai cermin wacana politik yang berkembang di setiap masa (Beyer & Apple, 1998). Pada masa Reformasi, kurikulum mengalami perubahan besar dengan pendekatan yang lebih demokratis dan desentralistik (Sari & Sirozi, 2023). Menurut Wicaksono, (2021) Kurikulum 2004 dan 2006 memberikan otonomi kepada sekolah dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal, mencerminkan wacana demokratisasi yang berkembang pada saat itu. Ini menegaskan apa yang diyakini oleh (Hoyle (1969) bahwa selain sebagai instrumen kontrol, kurikulum juga berfungsi sebagai refleksi dari perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Daniel, (2018) menjelaskan bahwa Kurikulum tidak hanya ditentukan oleh penguasa politik, tetapi juga dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial dan tuntutan masyarakat. Sedanagkan menurut (Becher, 2024) Becher, T., & Maclure, S. (2024) perubahan kurikulum selalu menandakan pergeseran wacana dari kontrol ketat negara menuju desentralisasi yang lebih memberdayakan komunitas sekolah.

Diskontinuitas juga erat kaitannya dengan kekuasaan (Cattaneo, 2019). Kekuasaan tidak bersifat monolitik, tetapi tersebar dalam jaringan sosial dan bekerja melalui berbagai institusi, seperti pendidikan, medis, hukum, dan lain-lain. Pergeseran wacana sebenarnya mencerminkan perubahan dalam konfigurasi kekuasaan tersebut. Ketika struktur kekuasaan berubah, wacana yang mendukungnya juga mengalami pergeseran, menciptakan diskontinuitas dalam cara masyarakat memahami dan mengatur kehidupan sosial. Dengan kata lain, diskontinuitas menandai titik di mana kekuasaan menghasilkan wacana baru untuk mengatur dan mengontrol masyarakat.

Menggunakan perspektif Foucault dalam (Adam & Kamaruddin, 2024) maka perlu melihat pergeseran kurikulum di Indonesia sebagai peta diskursus kekuasaan yang berubah dari waktu ke waktu. Dengan demikian perubahan kurikulum tentu mencerminkan pergantian wacana dominan dan bagaimana kekuasaan menggunakan pendidikan untuk membentuk masyarakat sesuai dengan visi dan kepentingan politiknya (Giroux, 1980). MenurutD, Rismawan (2024) bahwa Perubahan kurikulum tidak dapat dipisahkan dengan relasi kuasa pemerintah dalam membangun narasi sejarah yang sesuai dengan kepentingannya. Misalnya perubahan kurikulum dari masa orde lama ke orde baru mengubah narasi terkait Soekarno.

Perubahan kurikulum menandakan adanya perubahan episteme yang dominan di tengah masyarakat, baik wacana kuasa internal pemerintahan maupun wacana secara lebih luas (Stein, 2017). Perubahan-perubahan itu menciptakan patahan-patahan itu sendiri. Misalnya diskontinuitas kembali terjadi dari Kurikulum KTSP tahun 2006 menuju kurikulum 2013 atau K.13. pada kurikulum KTSP wacana dominannya adalah kontekstualisasi pembelajaran. Sedangkan pada kurikulum 2013 fokus pada wacana pembentukan karakter. Hal di atas menunjukkan bahwa episteme pengambil kebijakan di Indonesia setiap masa berusaha memiliki fokusnya masing-masing. Padahal sebaiknya kurikulum itu mesti memiliki dasar filosofi yang kokoh sehingga tidak mudah berubah seturut dengan arus perubahan (Talavaki et al., 2018). Pada tahun selanjutnya, tepatnya memasuki tahun 2022 kembali terjadi diskontinuitas dengan diluncurkan Kurikulum Merdeka. Pada masa tersebut wacana utamanya adalah penyiapan luaran pendidikan yang siap kerja. Sehingga upaya pendidikan adalah melakukan penyesuaian agar muatan pembelajaran menjawab kebutuhan pasar. Pada saat yang sama kehadiran kurikulum merdeka mendekonstruksi keamanan disiplin ilmu dengan melakukan pembelajaran lintas keilmuan.

Pada dasarnya perubahan kurikulum selalu membawa wacana baru yang diinginkan oleh kekuasaan politik yang sedang berkuasa. Pada saat yang sama maka mereka menciptakan diskontinuitas dari focus pendidikan sebelumnya. Perubahan kurikulum ini tidak hanya terjadi di tataran filosofis namun hingga pada level teknis. Ketika perubahan level teknis terjadi maka menciptakan pola kebiasaan baru para aktor pendidikan. Inilah yang disebut Foucault dalam (Driver, 1985) penciptaan disiplin tubuh melalui kuasa wacana dominan. Pada akhirnya penulis menyakini bahwa untuk mencapai pendidikan yang lebih stabil dan berkelanjutan, maka dibutuhkan perumusan kurikulum yang lebih independen dari kepentingan politik sesaat. Kita mesti memiliki pandangan dunia atas realitas pendidikan Indonesia. Sebuah pendekatan yang berkesinambungan dan berorientasi jangka panjang. Cara ini akan membantu kurikulum bertahan dari berbagai perubahan. Mengapa ini penting, karena ketika kurikulum terus menerus menjadi arena tarik-menarik kekuasaan, maka pendidikan di Indonesia akan sulit tumbuh dan berkembang karena tidak memiliki akar yang kuat. Kurikulum yang stabil adalah kunci membangun peta jalan manusia Indonesia kuat berhadapan dengan perubahan.

KESIMPULAN

Kurikulum pendidikan di Indonesia tidak berkembang secara linear atau kontinu, melainkan terbentuk oleh rangkaian patahan diskursus yang terjadi setiap kali terjadi pergantian rezim kekuasaan. Hal ini tersebut bisa dilihat dari puluhan kali perubahan kurikulum selalu menandakan adanya perubahan wacana pendidikan dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut menegaskan bahwa kurikulum menjadi arena tarik-menarik kepentingan politik daripada sebuah kebijakan yang berbasis kebutuhan pendidikan jangka pendek. Implikasi dari penelitian ini menyoroti pentingnya perumusan kurikulum yang lebih independen dari pengaruh kekuasaan politik atau kepentingan popularitas sesaat. Dibutuhkan kebijakan yang berorientasi pada stabilitas dan kontinuitas agar kurikulum dapat bertahan menghadapi perubahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, D., Retnaningrum, E., Dessye Parinussa, J., Sri Kuning, D., Manoppo, Y., & Made Kartika, I. (2023). Curriculum Development in Indonesia from a Historical Perspective. In *Journal of Education Research* (Vol. 4, Issue 2).
- Adam, A., & Kamaruddin, S. A. (2024). Power, Knowledge, and Language Hegemony from the Perspective of Michel Foucault. *101~108 International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHES)*, 6(1), 101–108. <https://doi.org/10.56338/ijhess.v6i1.4746>
- Adventyana, B. D. , Asdiniah, E. N. A. , Afriliani, M. , Magdalena, M. , F. S. F. N. , & , & Prihantini, P. (2024). *Dampak Kebijakan Perubahan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Bagi Guru dan Peserta Didik*.
- Alhamuddin, A. (2014). *Sejarah Kurikulum Di Indonesia (Studi Analisis Kebijakan Pengembangan Kurikulum)*.
- Ananda, A. P. , & , & Hudaidah, H. (2021). *Perkembangan Kurikulum Pendidikan Indonesia dari Masa ke Masa*.
- Asri, M. (2017). Dinamika Kurikulum Di Indonesia. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 4(2). <http://marifudin.wordpress.com/2011/06/18/sejarah-madrasah-di-indonesia/>.
- Beyer, L. E. , & , & Apple, M. W. (Eds.). (1998). *The Curriculum: Problems, Politics, and Possibilities*.
- Budio, S. , S. S. , Yanti, Y. , I. W. , & , & Kadri, J. (2021). Kebijakan Kurikulum Pendidikan Nasional (Kebijakan Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994 Dan Suplemen Kurikulum 1999, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004). *Jurnal Menata: Jurnal Program Studi Manajemen Pendidikan Islam*. <https://jurnal.staiyaptip.ac.id/index.php/menata/article/view/264/244>
- Cattaneo, M. D. , T. R. , & V.-B. G. (2019). Power calculations for regression-discontinuity designs. . *The Stata Journal* , 19(1), 210–245.
- D, R. (2024). Analisis Wacana Kritis Narasi Tentang Sukarno dalam Buku Teks Pembelajaran SMA (Kurikulum 1975, 1984, 1994, 2006, 2013). *Digilib Uns*.
- Daniel, I. K. A. (2018). *Historical, Political, and Societal Factors in Curriculum Design That Affect Academic Achievement in Nuba Mountains Region Schools*.
- Delissen, N. (2016). On Foucault's Work: Continuity Rather Than Rupture. . *Junctions: Graduate Journal of the Humanities*, 1(1).
- Doringin, F. (2022). *Penyesuaian Kurikulum Dalam Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Ferry Doringin*. <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium>
- Driver, F. (1985). Power, space, and the body: a critical assessment of Foucault's Discipline and Punish. . *Sage Journals* , 425–446.
- Erin Aprillia, Cut Nurhayati, & Anjani Putri Belawati Pandiangan. (2022). Perubahan Kurikulum Pada Proses Pembelajaran. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 1(4), 402–407. <https://doi.org/10.58540/jipsi.v1i4.78>
- Foucault, M. , & Nazzaro, A. M. (1972). *History, discourse and discontinuity*. *Salmagundi*, (20), 225-248. Skidmore College.
- Giroux, H. A. (1980). Critical Theory and Rationality in Citizenship Education. *Curriculum Inquiry*.

- Goswami, S. (2014). Michel Foucault: Structures of truth and power. . *European Journal of Philosophical Research*, 1, 8–20.
- Gough, N. (2019). From epistemology to ecopolitics: Renewing a paradigm for curriculum. In *Curriculum and Environmental Education*. Routledge, 102–120.
- Hanipah, S., Jalan, A. :, Mopah, K., & Merauke, L. (2023). Analisis Kurikulum Merdeka Belajar Dalam Memfasilitasi Pembelajaran Abad Ke-21 Pada Siswa Menengah Atas. In *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia (JUBPI)* (Vol. 1, Issue 2).
- Haryono, P. , Ridani, H. A. , Setyandari, A. , & Ardiansyah, W. (2024). *Manajemen Pendidikan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. .
- Hasibuan, A. T. , B. S. A. , Khairani, M. , &, & Siagian, E. A. ,. (2023). Telaah Kurikulum Dari Masa Ke Masa:Studi Evaluasi. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5.
- Hoyle, E. (1969). How Does the Curriculum Change? I. A Proposal for Inquiries. *Journal of Curriculum Studies*.
- Imron, M. (2018). Pengembangan Kurikulum 1994. *INTAJUNA: Jurnal Hasil Penelitian*, 2(1).
- Insani, F. D., Sunan, U., & Yogyakarta, K. (1947). *Sejarah Perkembangan Kurikulum di Indonesia Sejak Awal Kemerdekaan Hingga Saat ini*.
- Iyer, A. (2014). *Towards an epistemology of ruptures: The case of Heidegger and Foucault*. . A&C Black.
- Izmi, A. (2017). *Politik Kurikulum di Indonesia: Studi tentang Transisi Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968*.
- Jansen, I. (2008). Discourse analysis and Foucault's" Archaeology of knowledge". . *International Journal of Caring Sciences*, 1(3), 107.
- Julaeha, S. (2019). Problematika Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Karakter. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7(2), 157. <https://doi.org/10.36667/jppi.v7i2.367>
- Kaimuddin, K. (2015). Pengembangan kurikulum pendidikan tinggi. Al-TA'DIB. *Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 8(1), 19-38.
- Made Intan Dharma Santy, N., & Nasution, M. (2024). Efektivitas Penerapan Kurikulum Merdeka Bermain pada Taman Kanak-Kanak. *Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 290–299. <https://doi.org/10.37985/murhum.v5i1.529>
- Mark Bevir. (1999). *Foucault, Power, and Institutions*.
- McHoul, A. , & G. W. (2015). *A Foucault primer: Discourse, power and the subject*. Routledge.
- Miller, S. (1990). Foucault on discourse and power. *Theoria: A Journal of Social and Political Theory*, 76, 115–125.
- Mubarak, A. A., Aminah, S., Nasional, I., & Roiba, L. (2021). *Landasan Pengembangan Kurikulum Pendidikan di Indonesia*. <https://doi.org/10.17467/jdi.v3i2.324>
- Muqorrobin, M. , &, & Nisak, M. (2018). Kurikulum 2004/KBK (Kurikulum Brbasis Kompetensi). *INTAJUNA: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian, Produk Bidang Pendidikan Bahasa Arab*, 2(1).
- Rahim, A., & Ismaya, B. (2023). Pendidikan Karakter dalam Kurikulum Merdeka Belajar: Tantangan dan Peluang. *JSE: Journal Sains and Education*, 1.
- Retno, T., Sekolah, W., Atas, M., Amanatul, U., & Surabaya, U. (2022). Analisis Frekuensi Perubahan Kurikulum terhadap Konsistensi Pendidikan. In *JOIES: Journal of Islamic Education Studies* (Vol. 7, Issue 2).

- Santika, G. N., Suarni, N. K., & Lasmawan, W. (2022). *Analisis Perubahan Kurikulum Ditinjau dari Kurikulum sebagai Sebuah Ide*.
- Sari, A. K., & Sirozi, M. (2023). Politik Pendidikan Islam Indonesia Masa Reformasi (1998-Sekarang). *Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 20–37. <https://doi.org/10.32923/tarbawy.v10i1.3449>
- Soekmono, D. (1984). Kurikulum 1984. . *Analisis CSIS*, 5, 360–371.
- Stein, S. (2017). The persistent challenges of addressing epistemic dominance in higher education: Considering the case of curriculum internationalization. . *Comparative Education Review*, 61, 25–50.
- Talavaki, K. Z., Rahimi, A., & Aghajani, M. (2018). *Examining The Foundations, Philosophical Schools, Principles and The Nature of Curriculum*.
- Tri Saputra Aditya Tri Saputra Sekolah Dasar Negeri, A., & Jakarta, D. (2023). *Kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka : Revitalisasi Kurikulum Pendidikan di Indonesia* (Vol. 2, Issue 2).
- Wahyuni, F. (2015). *Kurikulum dari masa ke masa (telaah atas pentahapan kurikulum pendidikan di Indonesia)*.
- Wardhana, I. J. K. (2023). *Historiografi Pendidikan Indonesia: Genealogi Pendidikan Karakter dalam Lipatan Kesejarahan*. Jejak Pustaka.
- Wicaksono, J. A. (2021). Kebijakan Pendidikan Nasional Dalam Perkembangan Kurikulum Di Indonesia. *Ngabari: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*.